

TABEL VIII
KLASIFIKASI ASAL PENYULUHAN PERTANIAN YANG DITERIMA
OLEH PARA PETANI PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH ADA BUUD/KUD.

PENYULUHAN PERASAL DARI :	SEBELUM ADA BUUD/ KUD (dlm %)	SESUDAH ADA BUUD/ KUD (dlm %)
1. P.P.L.	39,58	66,66
2. Bimas/Inmas	2,08	-
3. BUUD/KUD	-	12,5
4. Kecamatan/Kelurahan	2,08	2,08
5. Tidak pernah menerima penyuluhan	56,25	18,75

Jika dipelajari data dalam tabel di atas, peranan BUUD/KUD memang relatif kecil dalam bidang ini. Namun kalau dilihat hasil penyuluhan secara keseluruhan akan nampak bahwa sebagian besar petani telah mendapat peningkatan pengetahuan pertanian melalui kegiatan penyuluhan ini. Hanya 18,75% petani saja yang menyatakan belum pernah mendengarkan penyuluhan pertanian.

Apabila data yang diuraikan di atas kebanyakan memberikan gambaran yang menggembirakan, maka tidak sama kiranya dalam bidang pemasaran hasil produksi pertanian. Tabel berikut ini akan mengungkapkan jalur-jalur pemasaran hasil produksi padi para petani di daerah penelitian ini.

TABEL IX
KLASIFIKASI JALUR PEMASARAN PADI PADA MASA
SEBELUM DAN SESUDAH ADA BUUD/KUD

JALUR PEMASARAN	SEBELUM ADA BUUD/ KUD (dlm %)	SESUDAH ADA BUUD/ KUD (dlm %)
1. Pasar	8,33	6,25
2. Tengkulak	22,91	27,08
3. BUUD/KUD	-	2,08
4. Toko/Warung sekitarnya	8,33	10,41
5. Pabrik beras	2,08	-
6. Tetangga	2,08	2,08
7. Tidak pernah menjual/di makan sendiri	56,25	52,08

Banyak hal menarik yang perlu dikaji dari data dalam tabel di atas. Pemasaran hasil produksi padi yang diharapkan akan mengalir ke lumbung-lumbung BUUD/KUD ternyata tidak sesuai dengan harapan. Hanya 2,08% saja petani yang menyeter padinya ke BUUD/KUD. Sedangkan para petani yang menjual padinya ke tengkulak dan toko jumlahnya cukup banyak yaitu sebesar 37,49%. Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa faktor penghambat sebagaimana telah diuraikan di bagian pertama dari bab ini. Dan para petani yang dapat dikelompokkan mempunyai hasil produksi padi yang cukup untuk dimakan sendiri sebesar 52,08%. Agaknya banyak faktor yang perlu dibenahi dalam tubuh BUUD/KUD agar lembaga ini mampu menyerap hasil produksi padi diwilayahnya.

Terutama dalam hal penyediaan anggaran pembelian, perlu disiapkan secara cukup sebelum musim panen datang.

Demikianlah analisa dari hasil pengumpulan data responden para petani dari 9 desa yang terdapat di dalam 3 kecamatan (yang ada KUD nya) dalam wilayah Kotamedya Surabaya. Di mana menunjukkan adanya kenyataan peningkatan hasil produksi padi pada masa sesudah terbentuknya BUUD/KUD, sejak tahun 1973.

Hal tersebut disebabkan sejak tahun 1973 hingga dewasa ini BUUD/KUD telah melayahi kebutuhan para petani, antara lain :

1. penyediaan modal dalam bentuk perkreditan termasuk Kredit Cendak Kulak.
2. penyuluhan sarana-sarana produksi dalam bentuk :
 - bibit padi,
 - pupuk
 - obat pembasmi hama.

Selain itu ditambah juga adanya penyuluhan pertanian yang pada umumnya dileksanakan oleh P.L.H. telah menunjukkan angka kenaikan sejak terbentuknya BUUD/KUD : bahkan pada dewasa ini boleh dikata sebagian besar petani telah mendapat peningkatan pengetahuan pertanian melalui kegiatan penyuluhan tersebut.

Bagian ketiga

Pengujian hypothesis

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab II, bahwa hypothesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

"BUUD/KUD memegang peranan dalam meningkatkan taraf hidup para petani".

Untuk pengujian tersebut perlu ditinjau hasil keseluruhan dari analisa pengumpulan data, yang terdiri dari dua kelompok responden yaitu petugas BUUD/KUD dan para petani.

Responden petugas BUUD/KUD

Untuk responden tersebut sengaja dipilih petugas BUUD/KUD dalam 3 KUD dari 5 KUD yang terdapat di Ketamadya Surabaya.

Di dalam wilayah Ketamadya Surabaya pada dewasa ini terdapat 5 KUD yaitu :

1. KUD Karangpilang
2. KUD Monocolo
3. KUD Tandes
4. KUD Sukelilo

Deri kelima KUD tersebut sengaja kami pilih tiga KUD yang mempunyai status hukum berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masing-masingnya, ialah :

1. KUD Karangpilang - berstatus badan hukum sejak Pebruari 1979 dan ditetapkan sebagai KUD model oleh Direktorat Jenderal Koperasi.

2. KUD Monocolo - berstatus badan hukum sejak Juli 1980.
3. KUD Sukolilo - belum berstatus badan hukum.

Dari ketiga KUD tersebut yang dewasa ini status hukumnya masih berbeda-beda, namun menunjukkan perkembangan yang tidak jauh berbeda, baik sejak adanya BUUD/KUD berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1973 sampai adanya KUD berdasar Inpres No. 2 Tahun 1978 (ini semuanya telah diuraikan di dalam bagian pertama dari bab ini).

Dengan adanya BUUD/KUD berdasarkan Inpres NO. 4 Tahun 1973, maka ketiga-BUUD/KUD tersebut telah melaksanakan ketiga fungsi dari empat fungsi Unit Desa ialah :

1. Perkreaitan
2. Penyaluran sarana produksi pupuk pestisida, benih serta alat-alat pertanian.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian.

Sedangkan fungsi penyuluhan dilaksanakan oleh P.P.L. dan sudah teratur rata-rata dua minggu sekali.

Dalam melaksanakan fungsi penyaluran sarana produksi, pupuk pestisida, benih serta alat-alat pertanian ketiga BUUD/KUD tersebut mengalami sedikit hambatan disebabkan adanya beberapa hal antara lain :

1. masih terbatasnya jumlah kios yang dimiliki oleh BUUD/KUD, yang rata-rata hanya memiliki 3 Kios yang terletak di tiga desa; sedangkan wilayah ketiga BUUD/KUD tersebut masing-masing meliputi antara 13-22 desa ; sehingga penyaluran tersebut tidak dapat merata keseluruhan pelosok desa.

2. masih kurang tepat waktu datangnya sarana produksi serta alat-alat pertanian tersebut dengan kebutuhan para petani.

Dalam melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, ketiga BUUD/KUD tersebut mengalami hambatan antara lain disebabkan adanya beberapa faktor, ialah :

1. kurangnya modal dari ketiga BUUD/KUD tersebut, sehingga mengakibatkan adanya beberapa hal :
 - dalam pengolahan hasil produksi berakibat pada kurangnya peralatan/perlengkapan, sehingga tidak dapat dilayani seluruh kebutuhan para petani.
 - dalam pemasaran hasil produksi, berakibat pada pembelian hasil produksi para petani tidak dapat dilayani seluruhnya, sehingga dengan terpaksa para petani menjual hasil produksi-nya kepada para tengkulak yang langsung ketempat tempat pengolahan hasil produksi pertanian tersebut (sawah-sawah) dengan membawa/membayar uang tunai.
2. adanya penentuan harga beli BUUD/KUD kadang-kadang lebih rendah dari harga luar/harga pasar, sehingga para petani lebih senang menjual di pasar.
3. kurangnya pengertian serta kesadaran para petani akan manfaat dari adanya BUUD/KUD tersebut, hal tersebut kemungkinan disebabkan masih kurangnya penerangan-penerangan ke pelosok-pelosok desa mengenai arti serta pentingnya BUUD/KUD bagi para petani seluruhnya.

Dalam melaksanakan fungsi perkreditan Kredit Canda Kulak, ketiga BUUD/KUD tersebut mengalami sedikit hambatan, disebabkan adanya tunggakan-tunggakan dari para anggota (nasebah) sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan dalam arti pelayanan Kredit Canda Kulak tersebut. Hal tersebut juga disebabkan masih kurangnya pengertian serta kesadaran dari para anggota K.C.K. tersebut akan arti serta manfaat dari KCK khususnya dan BUUD/KUD pada umumnya bagi perkembangan dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Kemudian sejak adanya Inpres No.2 Tahun 1978, maka ketiga BUUD/KUD tersebut telah disesuaikan, hanya pelaksanaannya ada yang cepat, sedang dan lambat, yang semuanya menuju terbentuknya KUD berdasar Inpres No.2 Tahun 1978.

Ketiga KUD yang baru tersebut ternyata juga telah melaksanakan keempat fungsi yang dimilikinya yaitu :

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-lainnya.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya.

Dalam melaksanakan keempat fungsi tersebut pada dewasa ini ketiga KUD tersebut juga masih menghadapi adanya beberapa hambatan sebagaimana halnya yang dihadapi oleh BUUD/KUD yang lama (1973-1978).

Mengenai Kredit Canda Kulak, setelah sekian lama dilaksanakan sejak tahun 1976 oleh ketiga BUUD/KUD hingga dewasa ini oleh ketiga

1. Kecamatan Karangpilang : a. Desa Lakarsantri
b. " Wiyung
c. " Bulaklumpri
2. Kecamatan Monocolo : a. Desa Ketintang
b. " Gayungan
c. " Karah.
3. Kecamatan Sukolilo : a. Desa Klampis Ngasem
b. " Mulyorejo
c. " Tanah Kalikedinding.

Dari kesembilan desa tersebut yang perkembangannya boleh dikatakan satu sama lain tidak sama dalam arti ada yang cepat, sedang atau lambat, tergantung dari semangat, kelincahan serta kegiatan dari warga desanya, namun masing-masingnya menunjukkan data-data yang tidak jauh berbeda. Dan di sembilan desa tersebutlah terdapat/terletak adanya kios-kios KUD untuk melayani seluruh warga desa dari ketiga kecamatan tersebut dalam hal penyediaan dan penyaluran sarana sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.

Dari para petani tersebut diperoleh data yang menunjukkan bahwa setelah adanya BUUD/KUD sejak tahun 1973 hingga dewasa ini para petani tersebut pada umumnya telah mendapat pelayanan dari BUUD/KUD. Baik dalam hal penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya, maupun dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil produksi, juga mengenai perkreditan dalam bentuk kredit candak kulak, dan kegiatan perekonomian lainnya; walaupun belum dapat merata keseluruh warga desa disebabkan masih adanya beberapa hambatan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Selain itu sejak adanya BUUD/KUD, maka hasil produksi padi dari kesembilan desa tersebut boleh dikata menunjukkan peningkatannya, sebagaimana hasil data yang diperoleh dari responden para petani ; demikian juga yang pernah dialami oleh KUD Karangpilang dalam bidang pengadaan pangan selama periode musim panen 1978/1979 telah berhasil mengumpulkan gabah dan beras sebanyak 100 Ton. Walaupun hal ini masih belum dapat merata keseluruh pelosok desa dari ketiga Kecamatan tersebut, karena masih adanya beberapa hambatan tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa sejak adanya BUUD/KUD berdasar Inpres No.4 Tahun 1973 kemudian menjadi KUD berdasar inpres No. 2 Tahun 1978, maka secara bertahap dan berencana seluruh fungsi yang dimilikinya telah dilaksanakannya walaupun melalui adanya beberapa hambatan. Sehingga para petani dapat dipenuhi kebutuhannya yang meliputi antara lain sarana-sarana produksi dan alat-alat pertanian juga pengolahan dan pemasaran hasil produksinya ditambah adanya kesempatan mendapat kredit (K.C.K.) sebagai bekal tambahan untuk meningkatkan usahanya. Walaupun masih kurang sempurna namun data kenyataan nya hal tersebut merupakan unsur pendorong sehingga hasil produksi pertanian menjadi meningkat/bertambah maka pendapatan para petani juga dapat meningkat, sehingga taraf hidup para petani pun boleh dikata meningkat.

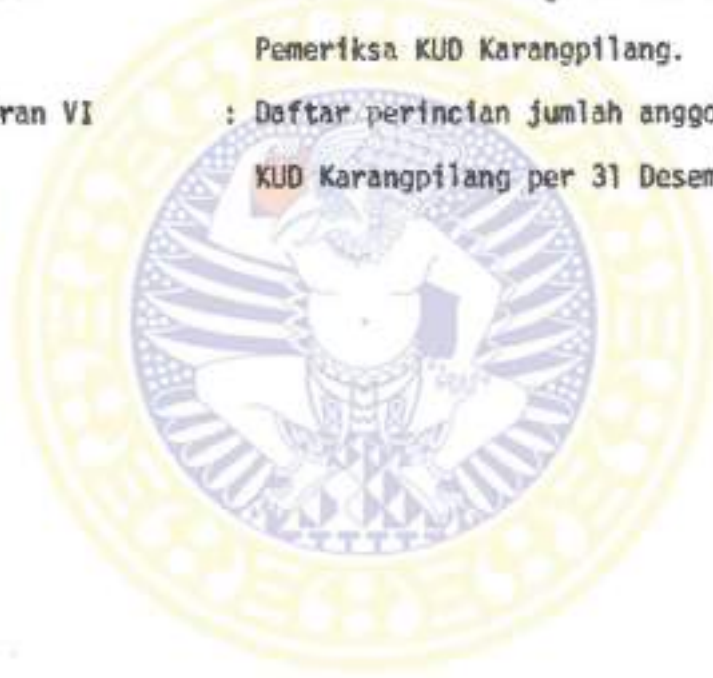
Jadi hypothesis yang akan diuji menunjukkan kearah kebenaran, dengan masih perlu adanya beberapa tambahan guna penyempurnaan dalam arti bahwa :

1. BUUD/KUD masih perlu ditingkatkan guna mengatasi beberapa hambatan (yang tersebut di atas), yang meliputi :
 - tambahan fasilitas-fasilitas dari Pemerintah ;
 - tambahan penataran-penataran bagi para petugas.
2. Pengertian serta kesadaran dari masyarakat lebih dimantapkan mengenai arti dan manfaatnya BUUD/KUD bagi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidupnya, dengan melalui penerangan-penerangan ke daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok desa.
3. Kontrol dari pusat ke daerah-daerah lebih ditingkatkan, dalam arti lebih diawasi mengenai pelaksanaan dari BUUD/KUD, sehari-harinya di daerah-daerah sampai ke desa-desa.



Bagian keempatLampiran-Lampiran

1. Lampiran I : Kontrol sheet
2. Lampiran II : Kuesioner petugas BUUD/KUD.
3. Lampiran III : Kuesioner para petani
4. Lampiran IV : Struktur organisasi KUD Karangpilang.
5. Lampiran V : Daftar Formasi Pengurus dan Badan
Pemeriksa KUD Karangpilang.
6. Lampiran VI : Daftar perincian jumlah anggota per desa
KUD Karangpilang per 31 Desember 1979



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Team Peneliti BUUD/KUD se Kodya Surabaya.

Control sheet.

Kecamatan : Sukolilo

Karangpilang

Monocolo

Luas areal persawahan

Jumlah penduduk

Jumlah desa

Desa : - Klampis Ngasem

- Balasklumprik

- Mulyorejo

- Ketintang

- Tanah Kalikedinding

- Gayungan

- Lakarsantri

- Karah

- W'j y u n g

Luas areal persawahan

Jumlah penduduk

Nama Editor

Nama data kolektor

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanggal Editing

Tanggal keloksi data

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Team Peneliti BUUD/KUD se Kota Surabaya.

Kuesioner untuk Responden petugas BUUD/KUD.

Dari tahun 1973 - 1978

1. Sebelum adanya BUUD/KUD, apakah telah ada koperasi pertanian/
Koperasi desa ?
 - a. Tidak ada.
 - b. Ada satu Koperasi Pertanian/Koperasi Desa.
 - c. Ada Lebih dari satu Koperasi Pertanian/Koperasi Desa.
2. Sejak kapan berdirinya BUUD/KUD ?
 - a. Tahun 1973.
 - b. Tahun 1974
 - c. Tahun 1975.
3. Bagaimana cara pertumbuhannya ?
 - a. Melalui BUUD.
 - b. Langsung menjadi KUD.
 - c. Lain-lain.
4. Pembentukan, pengesahan, dan kepengurusan BUUD/KUD, diatur
oleh siapa ?
 - a. Menteri Dalam Negeri.
 - b. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
 - c. Lain-lain.

5. Daerah kerja BUUD/KUD meliputi satu wilayah Unit Desa yang luas areal persawahannya antara 600 ha sampai dengan 1.000 ha, itu meliputi berapa kecamatan ?
- a. Satu Kecamatan.
 - b. Dua Kecamatan.
 - c. Lebih dari dua Kecamatan.
6. BUUD/KUD telah melaksanakan fungsi apa saja dari keempat fungsi Unit Desa ?
- a. Penyuluhan.
 - b. Perkreditan.
 - c. Penyaluran sarana produksi, pupuk, pestisida, benih serta alat-alat pertanian.
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian.
7. Selain keempat fungsi Unit Desa, apakah BUUD/KUD juga melaksanakan usaha/kegiatan yang lain ?
- a. Mengusahakan kebutuhan akan adanya 8 bahan pokok bagi para petani.
 - b. Mengadakan kegiatan di dalam bidang pendidikan (sekolahan2).
 - c. Tidak ada usaha/kegiatan lain.
8. Apakah dalam wilayah Unit Desa telah ada BRI UNIT Desa ?
- a. Ada satu BRI Unit Desa.
 - b. Lebih dari satu BRI Unit Desa.
 - c. Belum ada.

9. Apakah dalam wilayah Unit Desa telah ada Kios Unit Desa ?
- Ada satu Kios Unit Desa di
 - Lebih dari satu Kios Unit Desa (.
di
 - Belum ada.
10. Apakah PPL telah melaksanakan fungsi penyuluhan secara teratur ?
- Sudah teratur (.....x per minggu).
 - Belum teratur.
 - Belum pernah.
11. Apakah BUUD/KUD telah melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian dengan sempurna ?
- Sudah sempurna.
 - Kurang sempurna.
 - Belum sempurna.
12. Faktor apa yang merupakan penghambat bagi BUUD/KUD dalam melaksanakan fungsi pengolahan hasil produksi pertanian ?
- Peralatan/perlengkapan : - alat pengolahan.
- alat perontok.
- alat pengering.
- huller.
- tempat penjemuran.
- gudang.
- truk.
 - Sikap serta kebiasaan para petani.
 - Lain-lain (pengaruh dari luar.)

Sejak tahun 1978.

1. Bagaimana BUUD/KUD dari Inpres No.4 tahun 1973 dengan adanya Inpres No. 2 tahun 1978 ?
 - a. Telah disesuaikan.
 - b. Sedang disesuaikan.
 - c. Belum disesuaikan.
2. Bagaimana cara penyesuaiannya ?
 - a. BUUD/KUD langsung menjadi KUD menurut Inpres No. 2 tahun 1978.
 - b. Dibentuk KUD baru oleh pejabat.
 - c. Dibentuk KUD baru oleh warga desa.
3. Apakah KUD telah berbadan hukum ?
 - a. Sudah.
 - b. Sedang dalam proses.
 - c. Belum.
4. Apakah BUUD berdasar Inpres No. 2 tahun 1978 telah dibentuk ?
 - a. Sudah.
 - b. Sedang.
 - c. Belum.
5. Wilayah suatu BUUD/KUD meliputi berapa kecamatan ?
 - a. Satu Kecamatan.
 - b. Dua Kecamatan.
 - c. Lebih dari dua Kecamatan.

6. KUD telah melaksanakan fungsi apa saja dari keempat fungsi yang dimilikinya ?
- Perkreditan.
 - Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.
 - Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
 - Kegiatan perekonomian lainnya.
7. KUD dalam melaksanakan fungsi perkreditan meliputi jenis apa saja ?
- Candak Kulak.
 - Kredit dengan jaminan LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi).
 - Lain-lain .
8. Apakah kredit candak kulak dapat meningkatkan kemampuan usaha masyarakat desa dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan?
- Dapat \pm %
 - dang \pm %
 - Belum dapat.
9. Apakah prosedur kredit candak kulak tidak terlalu lama dan ruwet ?
- Mudah dan cepat.
 - Agak lama dan ruwet .
 - Terlalu lama dan ruwet.
10. Apakah KUD dalam melaksanakan fungsi penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barangkeperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya tidak memenuhi /menghadapi hambatan-hambatan?

- a. Tidak ada hambatan-hambatan.
- b. Ada beberapa hambatan, disebabkan beberapa faktor :

- c. Lain-lain.

11. Faktor apa yang merupakan penghambat bagi KUD dalam melaksanakan fungsi pengolahan hasil produksi ?

- a. Peralatan/perlengkapan masih kurang :
 - alat pengolahan.
 - alat perontok.
 - alat pengering.
 - huller.
 - tempat penjemuran.
 - gudang.
 - truk.
- b. Kurangnya pengertian dari para petani disebabkan adanya kebiasaan para petani.
- c. Lain-lain (pengaruh dari luar).

12. Faktor apa yang merupakan penghambat bagi KUD dalam melaksanakan fungsi pemasaran hasil produksi ?

- a. Modal.
- b. Sikap serta kebiasaan para petani.
- c. Harga.

13. Apakah KUD telah melaksanakan fungsi kegiatan perekonomian lainnya?
- a. Belum
 - b. Sudah, dalam bentuk :
.....
14. Apakah KUD telah mempunyai petugas-petugas khusus dalam menangani masing-masing fungsi yang dimilikinya ?
- a. Sudah ada masing-masingnya.
 - b. Masih dirangkap satu dengan lainnya.
 - c. Belum ada.
15. Apakah KUD telah mempunyai kelengkapan organisasi dan manajemen koperasi seperti :
- Rapat anggota yang memegang kekuasaan tertinggi.
 - Badan Pemeriksa yang mengawasi kegiatan organisasi.
 - Pengurus yang menjalankan keputusan-keputusan rapat anggota, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Manajer.
- a. Belum.
 - b. Sudah seluruhnya.
 - c. Hanya sebagian :
16. Apakah manajer dari KUD telah dengan teratur mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi setempat ?
- a. Sudah dengan teratur.
 - b. Belum teratur, hanya kadang-kadang.
 - c. Belum pernah.

17. Jumlah anggota KUD berapa persen dari jumlah penduduk ?
- 75% lebih.
 - 50% lebih.
 - 25% lebih.
 - kurang dari 25%.
18. Bagaimana perbandingan antara jumlah anggota KUD (sejak th.1978). dengan anggota BUUD/KUD (tahun 1973-1978) ?
- naik,%
 - turun,%
 - tetap.
19. Apakah yang mendapat kredit candak kulak langsung menjadi anggota KUD ?
- Ya
 - tidak
 - lain-lain.
20. Apakah tiap warga desa yang mendapat pelayaran dari KUD menjadi anggota KUD pula ?
- secara langsung/otomatis
 - sukarela.
 - lain-lain.
- 21 Apakah anggota BUUD dapat juga duduk dalam kepengurusan KUD dan sebaliknya?
- ya/boleh
 - tidak dapat
 - lain-lain.

22. Berapa jumlah anggota BUUD.
- a. disesuaikan dengan kebutuhan
 - b. maksimum 9 orang (.....)
 - c. lebih dari 9 orang.
23. Dalam usaha pengembangan KUD untuk penyelenggaraan dan peningkatan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan melalui apa ?
- a. Pemberian bantuan dan fasilitas kredit berdasar keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Gubernur Bank Indonesia No.:610/Kpb/X/1979
No.: 12/8/Kep/GBI
 - b. Dengan melalui beberapa jenis kredit.
 - K.I.K.
 - K.M.K.P.
 - Kredit dengan jaminan L.Y.K.K.
 - c. mendapat fasilitas dari Pemerintah.

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

Team Peneliti B U U D / K U D se Kodya Surabaya

Kwesioner Untuk Responden Petani
-----Sebelum ada B.U.U.D./K.U.D.

1. Apakah mata pencaharian para petani ?
 - a. sebagai petani pemilik.
 - b. sebagai petani penggarap.
2. Berapa luas tanah rata-rata yang dimiliki oleh petani pemilik ?
 - a. kurang dari 1/4 ha.
 - b. 1/4 ha.
 - c. 1/2 ha.
 - d. 1 ha atau lebih.
3. Berapa luas tanah rata-rata digarap oleh petani penggarap ?
 - a. kurang dari 1/4 ha.
 - b. 1/4 ha.
 - c. 1 ha atau lebih.
4. Siapa yang mengerjakan tanah petani pemilik ?
 - a. menggarap sendiri.
 - b. disewakan.
5. Bagaimana cara petani penggarap dalam mengerjakan tanah ?
 - a. oyotan.
 - b. tahun.
6. Modal untuk menggarap sawah berasal dari mana ?
 - a. modal sendiri.
 - b. utang dengan bunga tinggi.
 - c. bimas/inmas.
 - d. lain-lain.

7. Cara memperoleh bibit berasal dari mana ?
- a. milik sendiri.
 - b. bimas/inmas.
 - c. hutang.
 - d. lain-lain.
8. Apakah jenis padi yang ditanam ?
- a. V.U.T.W.
 - b. P.B.
 - c. palita.
 - d. lain-lain.
9. Cara memperoleh pupuk dari mana ?
- a. beli sendiri.
 - b. bimas/inmas.
 - c. lain-lain.
10. Cara memperoleh obat pembasmi hama dari mana ?
- a. beli sendiri.
 - b. bimas / inmas.
 - c. lain-lain.
11. Apakah pernah ada penyuluhan pertanian ?
- a. pernah dilakukan.
 - b. tidak.
12. Sehubungan dengan pertanyaan no.11, kalau jawaban a, dilakukan oleh siapa ?
- a. P.P.L.
 - b. bimas / inmas.
 - c. lain-lain.

13. Berapa hasil produksi padi setiap panen ?

- a. bagi pemilik tanah menggarap sendiri : kwt.
- b. bagi pemilik tanah yang disewakan :kwt.
- c. bagi penggarap tanah oyotan :kwt.
- d. bagi penggarap tanah tahunan :kwt.

14. Melalui apa cara pemasaran hasil produksi padi ?

- a. pasar.
- b. tengkulak.
- c. lain-lain.

Setelah ada B.U.U.D. / K.U.D.

15. Modal menggarap sawah berasal dari mana ?

- a. milik sendiri.
- b. hutang dengan bunga tinggi.
- c. B.U.U.D. /K.U.D.
- d. lain-lain.

16. Kalau jawaban nomor 15 itu c. maka jenis kredit yang diperoleh berupa apa ?

- a. candak kulak.
- b. kredit dengan jaminan kredit.
- c. lain-lain.

17. Bagaimana prosedur mendapatkan kredit ?

- a. mudah.
- b. sukar.
- c. lain-lain

18. Cara memperoleh bibit berasal dari mana ?

- | | |
|------------------|---------------|
| a. beli sendiri. | c. BUUD/KUD. |
| b. hutang. | d. lain-lain. |

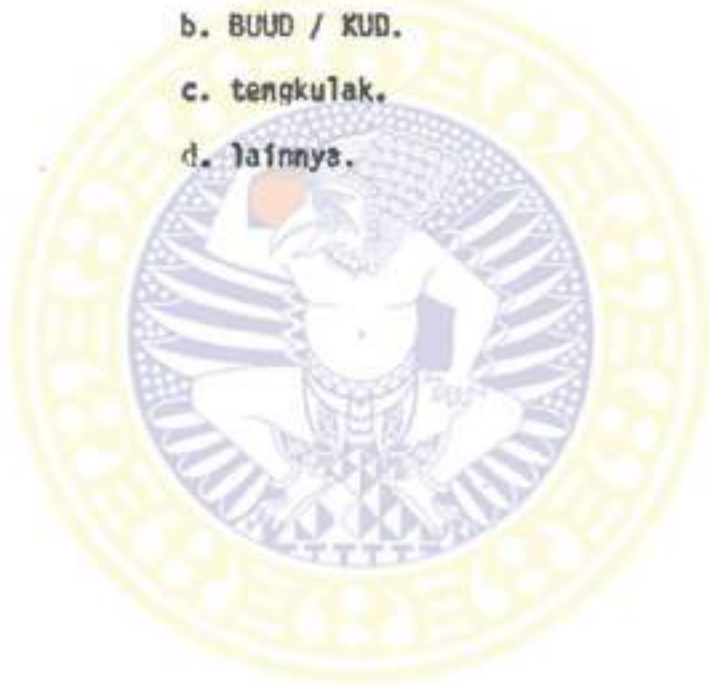
19. Apakah jenis padi yang ditanam ?
- V.U.T.W.
 - P.B.
 - Pelita.
 - Lain-lain
20. Cara memperoleh pupuk dari mana ?
- beli sendiri.
 - Hutang.
 - BUUD / KUD.
 - Lain-lain.
21. Cara memperoleh obat pembasmi hama berasal dari mana ?
- beli sendiri.
 - BUUD / KUD.
 - pemberian cuma-cuma dari dinas Pertanian.
 - Lain-lain.
22. Apakah pernah dilaksanakan penyuluhan pertanian ?
- pernah dilakukan.
 - tidak pernah.
23. Kalau pernah dilakukan oleh siapa ?
- PPL.
 - BUUD / KUD.
 - lain-lain.
24. Berapa hasil produksi padi setiap panen ?
- bagi pemilik tanah menggarap sendiri :kwt.
 - bagi pemilik tanah yang disewakan :kwt.
 - bagi penggarap tanah oyotan :kwt.
 - bagi penggarap tanah tahunan :kwt.

25. Pengolahan hasil produksi dikerjakan oleh siapa ?

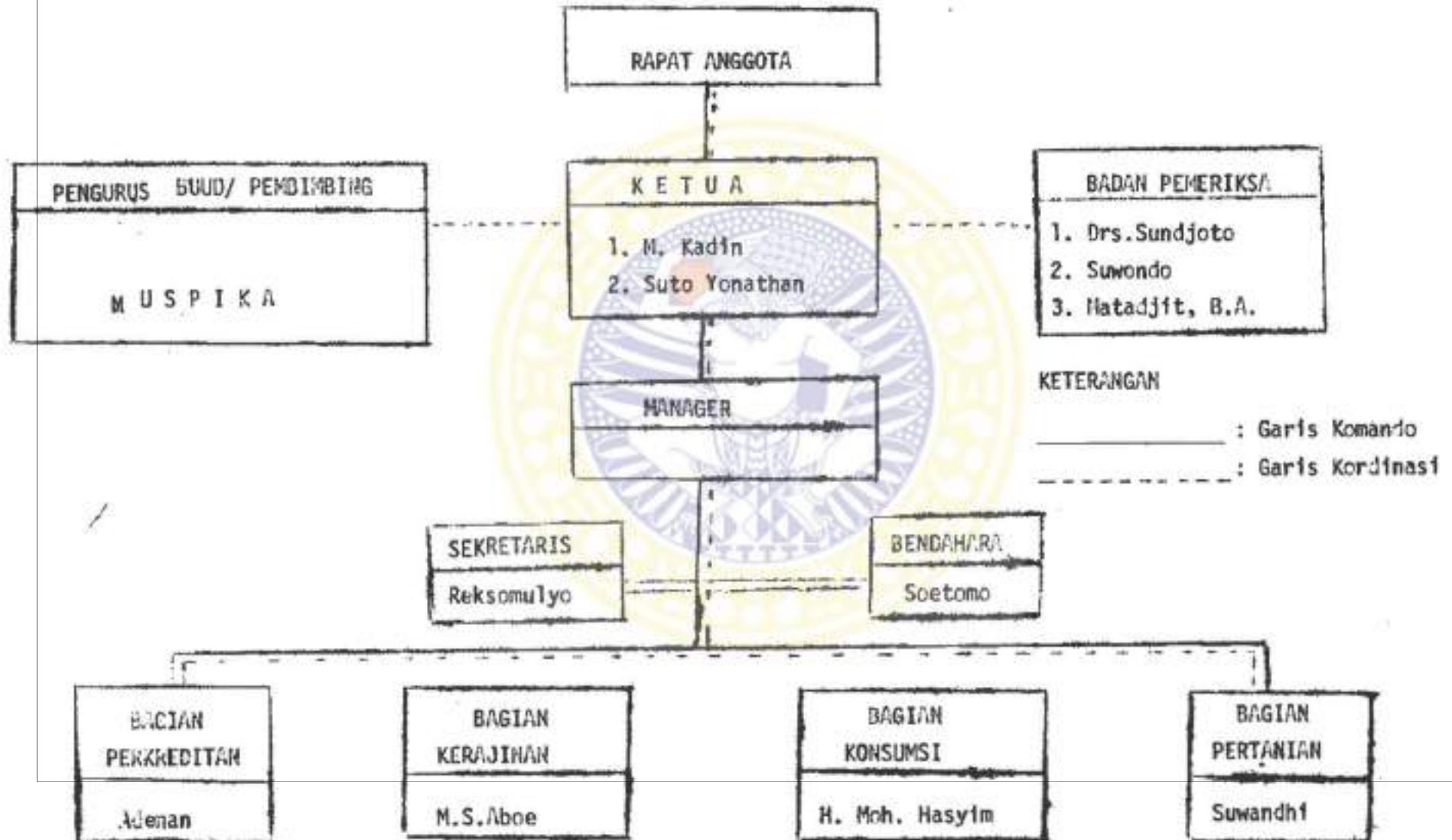
- a. sendiri.
- b. BUUD / KUD.
- c. lainnya.

26. Melalui apa cara pemasaran hasil produksi padi ?

- a. melalui pasar.
- b. BUUD / KUD.
- c. tengkulak.
- d. lainnya.



STRUKTUR ORGANISASI K.U.D. KARANGPILANG



Skripsi

BUUD/ KUD Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Meningkatkan Taraf Hidup...

Sri Wulan Aziz

Sumber :

Laporan Tahunan Tahun 1979 KUD Model, Karangpilang

DAFTAR FORMASI PENGURUS DAN BADAN PEMERIKSA K.U.D.KARANGPILANG

69

No.	N A M A	UMUR	PENDIDIKAN	J A B A T A N	PEKERJAAN	ALAMAT, DESA	KETERANGAN
1.	M. K a d i m	56 th	H. I. S.	Ketua I	Purnawirawan	Karangpilang	Merangkap Manajer.
2.	Suto Yonathan	63 th	S.D.	Ketua II	T a n i	Miyung	
3.	Reksomulyo	48 th	Taman Siswa	Sekretaris	T a n i	Miyung	
4.	S o e t o m o	60 th	S.G.B.	Bendahara	Pensiunan Guru	Kedurus	
5.	A d e n a n	50 th	S.M.P.	Bagian Perkreditan.	Purnawirawan	Kedurus	
6.	M.S. Aboe	65 th	Taman Siswa	Bag. Kerajinan Rumah tangga.	D a g a n g	Jajartunggal	
7.	H.Moh. Hasyim	58 th	S.M.P.	Bagian Konsumsi	Pengusaha	Kedurus	
8.	S u w a n d h i	39 th	S.M.A.	Bagian Pertanian	Pegawai PT Pertanian.	Kedurus	
9.	Drs. Sundjoto	40 th	I.I.P.	Badan Pemeriksa	Pegawai K.M.S.	Dukuh Kupang	
10.	S u w o n d o	50 th	S.M.P.	Badan Pemeriksa	Purnawirawan	Kedurus	
11.	Matadjit, B.A.	35 th	I.K.I.P.	Badan Pemeriksa	Kepala S.D.N.	Kebraon	

Surabaya, 31 Desember 1979

Pengurus KUD Karangpilang,

ttd

KUD KARANGPILANG PER 31 DESEMBER 1979.

No.	D E S A	JUMLAH ANGGOTA
1.	Kedurus	118 + 3
2.	Kebraon	34
3.	Karangpilang	25
4.	Warugunung	- + 6
5.	Balasklumprik	7 + 3 = 10
6.	Sumurwelut	7 + 3 = 10
7.	Bangkingan	2
8.	Lakarsantri	16
9.	Jeruk	-
10.	Lidahkulon	24
11.	Lidah wetan	14 + 7 = 21
12.	Babadan	2
13.	W i y u n g	145
14.	Jajartunggal	- + 14 + 1 = 15
15.	Gunungsari	- + 13
16.	Dukuhkupang	63
17.	Dukuhpakis	-
18.	L o n t a r	-
19.	M a d e	- + 20 + 7 = 27
20.	Sambikerep	- + 10
21.	Pradahkalikendal	-
22.	Bringin	- + 9
23.	Guru-Guru Agama sewilayah Kecamatan Karangpilang.	26 + 3+10 = 39
J U M L A H		483 + 66 *) = 549

Keterangan :

*) : Anggota tambahan.

Surabaya, 31 Desember 1979
A.n. Pengurus KUD Karangpilang,

ttd.

M. K. A. D. I. N.

(Ketua I)

BAB IV.

KESIMPULAN.

Dari responden petugas BUUD/KUD dalam 3 KUD dari 5 KUD yang terdapat di dalam wilayah Kotamadya Surabaya, diperoleh data sebagai berikut :

1. Baik BUUD/KUD berdasarkan Inpres No.4 Tahun 1973, maupun KUD berdasarkan Inpres No.2 Tahun 1978, semuanya telah dibentuk dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, demikian juga mengenai struktur organisasinya.
2. Sejak adanya BUUD/KUD pada tahun 1973 sampai dengan terbentuknya KUD (Inpres No.2 tahun 1978) hingga dewasa ini maka secara bertahap dan berencana seluruh fungsi yang dimilikinya telah dilaksanakan walaupun dengan melalui hambatan-hambatan disebabkan adanya beberapa faktor, antara lain :
 - masih kurangnya modal yang dimiliki oleh BUUD/KUD.
 - masih terbatasnya jumlah kios-kios dari BUUD/KUD.
 - adanya penentuan harga beli BUUD/KUD kadang-kadang lebih rendah dari harga pasar.
 - kurangnya pengertian serta kesadaran dari adanya BUUD/KUD tersebut.
 - kurangnya penerangan-penerangan ke pelosok-pelosok desa mengenai arti serta pentingnya BUUD/KUD bagi masyarakat desa pada umumnya, khususnya para petani.

3. Walaupun jumlah keanggotaan dari KUD menunjuk angka kearah kenaikan , namun ternyata masih kurang dari 25% dari jumlah seluruh penduduk dari masing-masing kecamatan.

Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan di dalam pasal 6 Undang-undang No.12 Tahun 1967 mengenai " sifat keanggotaan yang sukarela" sekalipun di dalam pasal 8 ayat 2 telah ditentukan bahwa " tiap warga desa yang mendapatkan pelayanan dari KUD menjadi anggota KUD". Namun ternyata untuk menjadi anggota KUD tidak boleh ada unsur paksaan harus benar-benar sukarela berdasar kesadarannya. Di sinilah unsur kesadaran dan pengertian dari masyarakat (masyarakat desa) akan arti dan manfaat dari BUUD/KUD boleh dikata sangat menentukan.

Dari responden para petani dari 9 desa yang terdapat di dalam 3 Kecamatan (yang ada KUDnya) dalam wilayah Kotamadya Surabaya, diperbolehkan data sebagai berikut :

Bahwa para petani telah dapat dipenuhi kebutuhannya oleh KUD antara lain dalam hal :

1. perkr ditan dalam bentuk Kredit CandaK Kulak.
2. penyaluran sarana-sarana produksi dan alat-alat pertanian serta barang-barang keperluan sehari-hari.
3. pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
4. kegiatan perekonomian lainnya.

Walaupun dalam pelaksanaannya dirasa masih kurang sempurna, dalam arti belum dapat merata/menyeluruh khususnya mengenai fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produksi, ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam kenyataannya hal

tersebut dapat merupakan salah satu unsur pendorong bagi peningkatan hasil produksi. Ini telah ternyata dari hasil pengumpulan data responden para petani, bahwa sejak terbentuknya BUUD/KUD pada tahun 1973 menunjukkan adanya peningkatan hasil produksi padi, maka dengan ini pendapatan para petani dapat menjadi meningkat, sehingga taraf hidup para petani pun boleh dikata meningkat.

Dengan demikian maka sejak terbentuknya BUUD/KUD dari tahun 1973 sampai menjadi KUD pada tahun 1978 hingga dewasa ini, boleh dikata bahwa taraf hidup para petani khususnya dan masyarakat desa pada umumnya adalah meningkat, walaupun masih kurang sempurna.

Sehingga dari ini jelas boleh dikata bahwa BUUD/KUD sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan taraf hidup para petani dengan melalui beberapa tambahan dalam arti penyempurnaan yang merupakan saran-saran sebagai berikut :

S a r a n - s a r a n :

1. BUUD/KUD masih perlu ditingkatkan guna mengatasi adanya beberapa hambatan, yaitu dengan melalui :
 - tambahan fasilitas-fasilitas dari Pemerintah dalam bentuk kredit, bantuan dan lain sebagainya (faktor-modal).
 - tambahan penataran-penataran bagi para petugas guna meningkatkan keahlian dan ketrampilannya (faktor skills).
2. Pengertian serta kesadaran dari masyarakat lebih dimantapkan mengenai arti dan manfaat BUUD/KUD bagi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidupnya, dengan melalui penerangan-penerangan.

kedaerah-daerah sampai ke pelosok-polosok desa, baik dari Jawatan Penerangan maupun oleh Direktorat Jenderal Koperasi/Jawatan Koperasi atau instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.

3. Pengawasan dari pusat kedaerah-daerah lebih di giatkan, dalam arti lebih diawasi/dikontrol mengenai pelaksanaan dari pelaksanaan BUUD/KUD, sehari-harinya di daerah-daerah sampai kedesa-desa.
4. Perlu difikut sertakan peranan Perguruan Tinggi dalam mengsucceskan BUUD/KUD sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan taraf hidup para petani khususnya dan golongan ekonomi lemah pada umumnya, dengan melalui penelitian-penelitian. Dengan ini perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam ruang lingkup dan masalah yang lebih luas.

Jadi setelah melalui pengujian hypotesa maka perlu adanya tambahan yang merupakan penyempurnaan yang berupa saran-saran tersebut, sehingga hypotesa " BUUD/KUD memegang peranan dalam meningkatkan taraf hidup para petani", dapat menunjukkan kearah kebenaran.
